OPTIMALISASI PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU DALAM PENCEGAHAN GANGGUAN TRANTIBUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

Muhammad Hafiz Belvananda Bagaskara
NPP. 33.0400
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: belvanandabagaskara@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mohammad Zaki Taufik, AP, M.Si.
Email: zaki.taufik74@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The increase in public activities during the Christmas and New Year period has the potential to trigger disturbances to public order and public peace. Although security measures have been implemented by the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP), disturbances to public order continue to occur in several strategic locations within West Bandung Regency. This condition indicates a gap between the expected level of public order and the actual effectiveness of security measures in preventing disturbances during the Christmas and New Year period.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the optimization of Christmas and New Year security measures in preventing disturbances to public order and public peace by the Civil Service Police Unit of West Bandung Regency.* ***Method:*** *This study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving Satpol PP personnel and related stakeholders. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques to identify the effectiveness of security measures, existing constraints, and optimization strategies in preventing public order disturbances.* ***Result:*** *The findings indicate that the frequency of public order disturbances increases during the Christmas and New Year period, particularly in areas with high community activity. The severity of disturbances ranges from low to high levels and has the potential to cause both material and non-material losses. Security measures implemented by Satpol PP include preventive, repressive, and persuasive approaches, which have generally been carried out adequately. However, the effectiveness of security operations is influenced by limitations in personnel numbers and supporting facilities and infrastructure. The integrated security post strategy and cross-sectoral coordination have contributed to reducing disturbances, although their implementation has not yet reached an optimal level.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the optimization of Christmas and New Year security measures in preventing public order disturbances in West Bandung Regency has not been fully achieved. Enhancing the number and capacity of personnel, strengthening facilities and infrastructure, and improving integrated security strategies and inter-agency coordination are necessary to increase the effectiveness of public order disturbance prevention during the Christmas and New Year period.*

Keywords: *Christmas and New Year; Civil Service Police Unit; Optimization; Public Order and Public Peace; Security Measures.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) cenderung meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru akibat tingginya aktivitas masyarakat di berbagai lokasi strategis. Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat memiliki tugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pengamanan. Namun, masih ditemukan gangguan trantibum yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ketertiban yang diharapkan dengan efektivitas pengamanan yang dilaksanakan, sehingga diperlukan optimalisasi kegiatan pengamanan dalam pencegahan gangguan trantibum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan pengamanan, tingkat gangguan trantibum, faktor yang memengaruhi efektivitas pengamanan, serta strategi yang diterapkan dalam pencegahan gangguan trantibum. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa frekuensi gangguan trantibum mengalami peningkatan pada periode Natal dan Tahun Baru, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Tingkat keparahan gangguan bervariasi dari ringan hingga tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian material maupun nonmaterial. Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan Satpol PP meliputi pendekatan preventif, represif, dan persuasif yang secara umum telah berjalan cukup baik. Namun, keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana masih memengaruhi efektivitas pengamanan. Selain itu, penerapan strategi pos terpadu dan koordinasi lintas sektor terbukti membantu menekan gangguan trantibum meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencegah seluruh potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kata kunci: Natal dan Tahun Baru; Optimalisasi; Pengamanan; Satpol PP; Trantibum.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) merupakan salah satu prasyarat utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, maupun keagamaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya kondisi yang tertib dan aman melalui berbagai upaya pencegahan maupun penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. (Labolo, 2016), ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan aktivitas secara aman, tertib, dan teratur sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban publik merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. (Meijer & Thaens, 2018) menjelaskan bahwa tata kelola keamanan yang efektif membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sedangkan (Braga et al., 2019) menemukan bahwa upaya pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai bentuk gangguan sosial mampu menurunkan tingkat gangguan keamanan dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut secara operasional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki fungsi menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui fungsi tersebut, Satpol PP menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk gangguan trantibum yang terjadi di wilayahnya. (Eviany & Sutiyo, 2023) menjelaskan bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk memberikan rasa aman, mencegah ancaman, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan ketertiban umum. Pendapat tersebut diperkuat oleh (Hughes & Rowe, 2007) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan aparat terkait dalam membangun sinergi dengan masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi antarlembaga.

Salah satu periode yang memiliki potensi peningkatan gangguan trantibum adalah perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode tersebut terjadi peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas wisata, keramaian pusat perbelanjaan, kegiatan keagamaan, serta berbagai aktivitas hiburan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan tersebut dapat berupa kemacetan, pelanggaran ketertiban umum, penyalahgunaan minuman beralkohol, aktivitas pedagang kaki lima yang tidak tertib, pengamen dan anak jalanan, hingga potensi konflik sosial yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Tingginya aktivitas masyarakat pada masa perayaan juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban apabila tidak diimbangi dengan langkah pengamanan yang memadai.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi pada periode Natal dan Tahun Baru. Selain memiliki berbagai destinasi wisata unggulan yang menjadi tujuan wisatawan dari berbagai daerah, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki wilayah administrasi yang luas yang terdiri atas 16 kecamatan dan 165 desa. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan pengamanan dan pengawasan ketertiban umum menjadi semakin kompleks, terutama pada saat terjadi peningkatan aktivitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat melaksanakan berbagai strategi pengamanan melalui patroli, monitoring, pembentukan pos terpadu, serta koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya gangguan trantibum. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ilham & Rahman, 2023) keberhasilan penyelenggaraan trantibum sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga, kesiapan sumber daya, serta efektivitas pengawasan dan pengendalian di lapangan. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Meijer & Thaens, 2018) yang menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan keamanan publik.

Meskipun berbagai upaya pengamanan telah dilaksanakan, berdasarkan kondisi lapangan masih ditemukan sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengamanan. Keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana pendukung, luas wilayah pengawasan, serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan tugas pengamanan secara optimal. Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru menyebabkan potensi gangguan trantibum tetap muncul meskipun telah dilakukan berbagai langkah pencegahan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, maupun pengamanan kegiatan masyarakat secara umum. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan trantibum oleh Satpol PP masih relatif terbatas. Kesenjangan

penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana upaya optimalisasi pengamanan dilakukan, strategi yang diterapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam mencegah gangguan trantibum pada periode Natal dan Tahun Baru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi ini menjadi penting karena ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, periode Natal dan Tahun Baru merupakan momentum yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa akibat meningkatnya mobilitas penduduk, aktivitas wisata, kegiatan keagamaan, serta konsentrasi masyarakat pada berbagai pusat keramaian.

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bandung Barat. Salah satu permasalahan utama adalah meningkatnya frekuensi gangguan trantibum selama periode perayaan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, gangguan yang sering terjadi meliputi kemacetan lalu lintas, aktivitas pedagang kaki lima yang tidak tertib, kerumunan masyarakat di pusat wisata dan pusat perbelanjaan, penyalahgunaan minuman beralkohol, serta keberadaan pengamen dan anak jalanan pada titik-titik tertentu. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut menyebabkan beban pengawasan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih besar dibandingkan kondisi normal.

Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mencakup 16 kecamatan dan 165 desa memerlukan cakupan pengawasan yang luas, sementara jumlah personel yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pengamanan di lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan dan patroli belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi mengalami gangguan trantibum secara optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengamanan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengamanan. Anggaran yang tersedia harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti patroli lapangan, penyediaan logistik personel, pembentukan pos pengamanan terpadu, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas kegiatan pengamanan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan, terutama pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama periode Natal dan Tahun Baru.

Selain faktor internal organisasi, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum juga masih menjadi tantangan. Masih ditemukan masyarakat yang melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, seperti berjualan di area terlarang, parkir tidak sesuai ketentuan, serta pelanggaran ketertiban lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan gangguan trantibum tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pengamanan kegiatan masyarakat, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan trantibum berdasarkan perspektif optimalisasi organisasi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada fungsi penegakan

Peraturan Daerah atau efektivitas kinerja Satpol PP secara umum, sementara kajian mengenai bagaimana tujuan pengamanan ditetapkan, strategi alternatif yang digunakan, serta pengaruh keterbatasan sumber daya terhadap pencapaian tujuan pengamanan pada periode Natal dan Tahun Baru masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu belum optimalnya pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru oleh Satpol PP dalam mencegah gangguan trantibum dengan mempertimbangkan aspek tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat periode perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu momen yang memiliki tingkat kerawanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang relatif tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, kegiatan keagamaan, serta konsentrasi massa di berbagai lokasi berpotensi menimbulkan berbagai gangguan trantibum, seperti pelanggaran ketertiban umum, kerusakan fasilitas publik, penyalahgunaan ruang publik, hingga potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pengamanan yang optimal dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dari aspek keilmuan, penelitian ini penting karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas optimalisasi pencegahan gangguan trantibum melalui kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru oleh Satpol PP. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek penegakan peraturan daerah, deteksi dini gangguan ketertiban, atau penguatan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi kinerja organisasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pendekatan preventif.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun strategi pengamanan yang lebih efektif pada periode Natal dan Tahun Baru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat gangguan trantibum, efektivitas kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan, serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan. Informasi tersebut diperlukan agar kebijakan, perencanaan personel, pengalokasian anggaran, penyediaan sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja akan mengalami keterbatasan data empiris dalam memahami efektivitas kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Akibatnya, kebijakan dan strategi pengamanan yang disusun berisiko kurang efektif dalam mencegah gangguan trantibum, sehingga potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada periode perayaan tetap tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi rasa aman masyarakat, menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta menghambat terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, peran Satuan Polisi Pamong Praja, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum memerlukan sinergi antara kapasitas aparatur, strategi pencegahan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sibarani, 2025) berjudul *"Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat"* mengkaji pelaksanaan fungsi deteksi dan pencegahan dini gangguan ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP. Penelitian ini berfokus pada mekanisme identifikasi potensi gangguan serta langkah-langkah preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran ketenteraman masyarakat.

Selanjutnya, (Masrinanda, 2025) melalui penelitian berjudul *"Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut"* membahas peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek sumber daya manusia, pembinaan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi anggota Satlinmas.

Penelitian (Effendy, 2020) yang berjudul *"Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau"* meneliti pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum. Fokus penelitian ini berada pada peran kelembagaan Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum.

Penelitian (Sumaili, 2025) berjudul *"Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara"* juga membahas penguatan kapasitas Satlinmas sebagai unsur pendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian tersebut menyoroti aspek pengembangan kapasitas organisasi dan peningkatan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Adapun penelitian (Muhammad Hasim, 2022) yang berjudul *"Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Satlinmas guna Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Takalar"* membahas pentingnya partisipasi masyarakat melalui Satlinmas dalam mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram. Penelitian ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai ketenteraman dan ketertiban umum lebih banyak berfokus pada pelaksanaan fungsi deteksi dini, peran kelembagaan Satpol PP, penguatan kapasitas Satlinmas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis memiliki karakteristik yang berbeda karena secara khusus mengkaji optimalisasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengarah pada kegiatan pengamanan hari besar keagamaan dan pergantian tahun sebagai bentuk tindakan preventif dalam pencegahan gangguan trantibum. Dari aspek teoritis, penelitian ini menggunakan perspektif optimalisasi organisasi dalam melihat efektivitas pelaksanaan pengamanan oleh Satpol PP. Dari aspek

kebijakan, penelitian ini berupaya menghasilkan rekomendasi strategis terkait peningkatan efektivitas pengamanan Natal dan Tahun Baru yang belum secara spesifik dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dari aspek objek penelitian, penelitian ini mengambil lokus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat dengan fokus pada kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang memiliki karakteristik kerawanan tersendiri akibat meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan potensi gangguan ketertiban umum selama periode perayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus masukan praktis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji. Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang dapat dilihat dari aspek fokus kajian, objek penelitian, kebijakan yang diteliti, serta teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sibarani, 2025) berfokus pada pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan gangguan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara itu, (Masrinanda, 2025) dan (Sumaili, 2025) lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Selanjutnya, (Effendy, 2020) mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum, sedangkan (Muhammad Hasim, 2022) berfokus pada optimalisasi peran serta masyarakat melalui Satlinmas dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji optimalisasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. Fokus tersebut belum ditemukan secara spesifik pada penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini memberikan sudut pandang baru terkait efektivitas kegiatan pengamanan pada momen tertentu yang memiliki tingkat kerawanan gangguan trantibum lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada karakteristik objek penelitian yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru sebagai salah satu bentuk upaya preventif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pengamanan pada periode tersebut memiliki karakteristik khusus karena melibatkan peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas keagamaan, aktivitas ekonomi, pusat keramaian, serta koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks dibandingkan penyelenggaraan ketertiban umum pada kondisi biasa.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori optimalisasi dari George R. Terry yang menekankan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat telah berjalan secara optimal dilihat dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, koordinasi, dan pelaksanaan tugas di lapangan. Penggunaan teori optimalisasi ini berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada konsep peran, kapasitas organisasi, pemberdayaan, maupun partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membahas optimalisasi pencegahan gangguan trantibum melalui kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru, penggunaan teori optimalisasi sebagai pisau analisis, serta karakteristik objek penelitian yang berfokus pada pelaksanaan pengamanan hari besar keagamaan dan pergantian tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademis dalam pengembangan kajian ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengamanan pada momen-momen strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan trantibum.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) melalui kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bandung Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena optimalisasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) melalui kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan ini dinilai tepat karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan capaian kuantitatif, tetapi juga menyangkut proses pelaksanaan kegiatan, koordinasi antarinstansi, pemanfaatan sumber daya, serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengamanan di lapangan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pengamanan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pencegahan gangguan trantibum. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan, mekanisme pengamanan, serta aktivitas personel dalam menjalankan tugasnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, data gangguan trantibum, peraturan perundang-undangan, surat tugas, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat karena memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pengamanan. Selain itu, informan pendukung terdiri atas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Komandan Regu atau personel Satpol PP yang terlibat langsung dalam pengamanan, perwakilan Kepolisian Resor Kabupaten Bandung Barat sebagai mitra koordinasi pengamanan, serta masyarakat yang berada di lokasi pengamanan atau menerima dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemilihan informan dari berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari perspektif pembuat kebijakan, pelaksana teknis, mitra kerja, dan masyarakat.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya. Transferabilitas dilakukan dengan menyajikan deskripsi penelitian secara rinci sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis. Dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Sementara itu, konfirmabilitas dilakukan dengan

memastikan bahwa seluruh temuan penelitian didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan dan dapat ditelusuri kembali sumbernya.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian sehingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dilakukan berdasarkan indikator optimalisasi yang digunakan dalam penelitian untuk menilai sejauh mana kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru telah berjalan secara efektif dalam mencegah terjadinya gangguan trantibum.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat serta beberapa lokasi pengamanan Natal dan Tahun Baru yang menjadi titik fokus pelaksanaan tugas Satpol PP di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan, pengumpulan dokumen pendukung, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual mengenai optimalisasi pencegahan gangguan trantibum melalui kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan teori optimalisasi dari (Siringoringo, 2005). Menurut Siringoringo, optimalisasi dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama yaitu tujuan (*objectives*), alternatif keputusan (*decision alternatives*), dan sumber daya yang membatasi (*limiting resources*). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru telah berjalan secara optimal dalam mencegah gangguan trantibum di Kabupaten Bandung Barat.

3.1. Tujuan

Dimensi tujuan berkaitan dengan arah dan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dalam penelitian ini dimensi tujuan diukur melalui tingkat frekuensi gangguan trantibum, tingkat keparahan gangguan dan kerugian yang ditimbulkan, serta jenis dan efektivitas kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

Tabel 1.
Frekuensi Gangguan Trantibum Selama Periode Natal dan Tahun Baru

Kategori	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Rendah	12	24
Sedang	28	56
Tinggi	10	20
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa frekuensi gangguan trantibum selama periode Natal dan Tahun Baru didominasi kategori sedang sebanyak 28 kejadian atau 56 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat yang meningkat selama perayaan Natal dan Tahun Baru berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum yang memerlukan pengawasan intensif dari Satpol PP.

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyatakan: "Tujuan utama pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah memastikan seluruh kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat."

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa personel Satpol PP ditempatkan pada beberapa titik keramaian seperti pusat wisata, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan guna mengantisipasi potensi gangguan yang meningkat selama perayaan berlangsung.

Tabel 2.
Tingkat Keparahan Gangguan Trantibum

Tingkat Keparahan	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Rendah	30	60
Sedang	15	30
Tinggi	5	10
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar gangguan yang terjadi tergolong ringan dengan persentase 60 persen. Gangguan tersebut berupa pelanggaran ketertiban umum, kerumunan masyarakat, dan aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menjelaskan: "Sebagian besar gangguan yang terjadi masih dapat ditangani secara cepat melalui patroli dan pendekatan persuasif sehingga tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar." Selain itu, dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa selama pelaksanaan pengamanan tidak ditemukan insiden besar yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tabel 3.
Jenis dan Efektivitas Kegiatan Pengamanan

Jenis Kegiatan	Frekuensi Kegiatan
Patroli Preventif	35
Pengamanan Tempat Ibadah	18
Penertiban Kerumunan	22
Monitoring Lokasi Wisata	25
Pos Pengamanan Terpadu	8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi diketahui bahwa kegiatan pengamanan dilaksanakan melalui patroli preventif, monitoring lokasi rawan, pengamanan tempat ibadah, serta pembentukan pos pengamanan terpadu. Kegiatan tersebut mampu menekan potensi gangguan sehingga kondisi keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru relatif kondusif.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dimensi tujuan telah terlaksana dengan cukup baik. Frekuensi gangguan masih terjadi namun sebagian besar berada pada

kategori sedang dan ringan sehingga tujuan pengamanan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dapat tercapai meskipun belum sepenuhnya optimal.

3.2. Alternatif Keputusan

Dimensi alternatif keputusan berkaitan dengan berbagai strategi yang dipilih Satpol PP untuk mencapai tujuan pengamanan. Analisis dilakukan melalui efektivitas kegiatan pengamanan, cakupan wilayah pengamanan, dan waktu respons terhadap laporan gangguan.

Tabel 4.
Efektivitas Kegiatan Pengamanan dalam Mendeteksi dan Mencegah Gangguan Trantibum

Kategori	Jumlah Informan	Persentase (%)
Efektif	17	68
Cukup Efektif	6	24
Kurang Efektif	2	8
Jumlah	25	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menilai kegiatan pengamanan yang dilakukan Satpol PP efektif dalam mendeteksi dan mencegah gangguan trantibum. Strategi patroli rutin dan pos pengamanan terpadu menjadi alternatif utama yang dinilai mampu menekan potensi gangguan.

Kabid Trantibum menyampaikan: "Proses pemilihan strategi dilakukan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, analisis situasi wilayah, serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya sehingga strategi yang dipilih dapat menyesuaikan kondisi lapangan."

Tabel 5.
Cakupan Wilayah Pengamanan

Kategori	Jumlah Wilayah	Persentase (%)
Terjangkau Optimal	11	69
Cukup Terjangkau	3	19
Belum Terjangkau Optimal	2	12
Jumlah	16	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Data menunjukkan sebagian besar wilayah telah terjangkau oleh kegiatan pengamanan. Namun masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan perhatian lebih karena kondisi geografis dan jarak yang relatif jauh dari pusat pengamanan.

Tabel 6.
Waktu Respon Satpol PP terhadap Laporan Gangguan

Waktu Respons	Freksuensi	Persentase (%)
< 15 Menit	18	36
15-30 Menit	24	48
> 30 Menit	8	16
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar laporan dapat ditangani dalam waktu 15–30 menit. Meskipun demikian, terdapat beberapa laporan yang memerlukan waktu lebih lama karena lokasi kejadian berada pada wilayah yang jauh dari pos pengamanan.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi alternatif keputusan berada pada kategori cukup optimal. Strategi yang dipilih telah mampu mendukung pelaksanaan pengamanan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.

3.3. Sumber Daya yang Membatasi

Dimensi sumber daya yang membatasi menjelaskan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Analisis dilakukan melalui jumlah personel, distribusi wilayah pengamanan, anggaran, serta frekuensi kegiatan pengamanan.

Tabel 7.
Jumlah Ketersediaan Personel Pengamanan

Keterangan	Jumlah
Personel Satpol PP terlibat	150 Orang
Pos Pengamanan	8 Pos
Kecamatan Terlayani	16 Kecamatan

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah personel yang tersedia masih belum sebanding dengan luas wilayah pengamanan yang harus dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa wilayah belum memperoleh pengawasan secara maksimal.

Tabel 8.
Distribusi Geografis Wilayah Pengamanan

Kategori	Persentase (%)
Mudah Dijangkau	62
Cukup Sulit Dijangkau	24
Sulit Dijangkau	14
Jumlah	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang luas dan memiliki kawasan pegunungan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengamanan.

Tabel 9.
Frekuensi Kegiatan Pengamanan Selama Nataru

Kategori	Frekuensi
Patroli	35
Monitoring	25
Penertiban	22
Pengamanan Tempat Ibadah	18

Operasi Gabungan	12

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan diketahui bahwa intensitas pengamanan cukup tinggi selama periode Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, keterbatasan personel dan sarana prasarana menyebabkan pelaksanaan pengamanan belum sepenuhnya optimal.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyampaikan: "Kendala utama dalam pelaksanaan pengamanan adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi, sehingga diperlukan pengaturan personel yang lebih efektif."

Berdasarkan hasil analisis, dimensi sumber daya yang membatasi menjadi aspek yang paling mempengaruhi optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Keterbatasan personel, luas wilayah, dan kebutuhan operasional menyebabkan pelaksanaan pengamanan belum mencapai kondisi optimal meskipun berbagai strategi telah diterapkan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, penulis menemukan bahwa pelaksanaan pengamanan telah berjalan cukup optimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui pencapaian tujuan pengamanan yang relatif baik, penerapan berbagai alternatif keputusan dalam pelaksanaan pengamanan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kelancaran kegiatan pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bandung Barat mampu menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli preventif, pengamanan tempat ibadah, monitoring lokasi wisata, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan pengamanan.

Pada dimensi tujuan, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar gangguan trantibum yang terjadi selama periode Natal dan Tahun Baru masih berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengamanan yang diterapkan mampu mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar. Dengan demikian, pengamanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat telah memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama perayaan berlangsung.

Pada dimensi alternatif keputusan, penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan berbagai strategi pengamanan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Strategi tersebut meliputi patroli rutin, penjagaan pada lokasi prioritas, pembentukan pos pengamanan terpadu, serta koordinasi dengan TNI, Polri, dan perangkat daerah lainnya. Dalam penelitian ini, pemilihan strategi pengamanan yang beragam terbukti membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap potensi gangguan trantibum.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa belum seluruh wilayah dapat dijangkau secara maksimal oleh kegiatan pengamanan. Beberapa wilayah yang memiliki karakteristik geografis cukup sulit memerlukan waktu respons yang lebih lama dibandingkan wilayah perkotaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karakteristik wilayah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki cakupan wilayah luas dengan kondisi geografis yang beragam sehingga membutuhkan sumber daya yang lebih besar.

Pada dimensi sumber daya yang membatasi, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah pengamanan menjadi tantangan utama dalam optimalisasi

pengamanan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pengamanan masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih efektif. Semakin memadai jumlah personel dan sarana pendukung yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat tetap mampu melaksanakan pengamanan secara cukup optimal melalui pengaturan personel, pembagian wilayah tugas, serta pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan trantibum oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat telah berjalan cukup baik berdasarkan dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Temuan ini memperkuat berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan pengamanan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, ketepatan strategi yang dipilih, serta kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan jumlah personel dan sarana pendukung agar pelaksanaan pengamanan pada masa mendatang dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan utama yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat mampu menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada tingkat yang cukup baik;
b. Strategi pengamanan berupa patroli preventif, pengamanan tempat ibadah, monitoring lokasi wisata, dan koordinasi lintas instansi terbukti efektif dalam mencegah terjadinya gangguan trantibum;
c. Keterbatasan jumlah personel dan luas wilayah pengamanan masih menjadi kendala utama dalam mencapai optimalisasi pengamanan secara menyeluruh;
d. Pengelolaan sumber daya yang efektif mampu membantu Satpol PP tetap melaksanakan tugas pengamanan meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya;
e. Temuan penelitian memperkuat teori optimalisasi Siringoringo bahwa pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan menentukan alternatif keputusan yang tepat serta pengelolaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa temuan menarik di luar indikator utama penelitian yang turut memengaruhi optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. Temuan-temuan tersebut berupa faktor pendukung dan faktor penghambat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pengamanan di lapangan.

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah kecamatan dan desa. Sinergi tersebut memudahkan proses pertukaran informasi, pembagian tugas, serta percepatan penanganan apabila ditemukan potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan pengamanan.

Selain itu, dukungan masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang cukup penting. Kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mematuhi aturan selama perayaan Natal dan Tahun Baru membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Partisipasi masyarakat dalam

memberikan informasi terkait potensi gangguan ketertiban juga mempermudah petugas dalam melakukan tindakan pencegahan secara dini.

Penulis juga menemukan bahwa pengalaman personel Satpol PP dalam melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal penting dalam pelaksanaan pengamanan. Pengalaman tersebut membantu personel memahami karakteristik wilayah, mengenali titik-titik rawan gangguan trantibum, serta menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

Di sisi lain, penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan pembagian personel harus dilakukan secara selektif sehingga tidak semua wilayah dapat memperoleh intensitas pengamanan yang sama.

Faktor penghambat lainnya adalah kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang cukup luas dan beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perdesaan, hingga daerah pegunungan dan objek wisata. Kondisi tersebut memengaruhi mobilitas petugas serta waktu respons dalam menjangkau lokasi yang berpotensi mengalami gangguan trantibum, terutama pada saat terjadi peningkatan aktivitas masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, penulis menemukan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengamanan masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli dan pengawasan di lapangan. Meskipun kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas secara keseluruhan, peningkatan sarana dan prasarana dinilai dapat mendukung pelaksanaan pengamanan yang lebih optimal pada masa mendatang.

Temuan menarik lainnya adalah adanya peningkatan keramaian masyarakat pada pusat keramaian, tempat wisata, dan jalur transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini menyebabkan potensi gangguan trantibum menjadi lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa sehingga membutuhkan kesiapsiagaan petugas yang lebih intensif. Oleh karena itu, penguatan pola pengamanan berbasis pemetaan wilayah rawan dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan gangguan trantibum di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru tidak hanya dipengaruhi oleh pencapaian tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa koordinasi lintas instansi, dukungan masyarakat, dan pengalaman personel, serta faktor penghambat berupa keterbatasan personel, kondisi geografis wilayah, dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pengamanan. Temuan ini menjadi masukan penting bagi Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dalam upaya meningkatkan kualitas pengamanan pada pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat telah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan pengamanan yang didukung oleh koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaan pengamanan, seperti keterbatasan personel, kondisi geografis wilayah, dan sarana prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya dan penguatan koordinasi guna mendukung pelaksanaan pengamanan yang lebih optimal pada masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat sehingga pengumpulan data hanya dilakukan pada periode pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun penelitian. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi penelitian sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah yang memiliki karakteristik dan kondisi wilayah yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji optimalisasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada lokasi yang berbeda atau dengan cakupan yang lebih luas, serta melibatkan berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan pengamanan. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas strategi pengamanan dan kolaborasi antarinstansi dalam pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Braga, A. A., Welsh, B. C., & Schnell, C. (2019). *Disorder policing to reduce crime : a systematic review*. https://doi.org/10.1002/cl2.1050

Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Di Kabupaten Berau. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 289–298. https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=9511

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo Eva perlindungan masyarakat.pdf

Hughes, G., & Rowe, M. (2007). *Neighbourhood policing and community safety: Researching the instabilities of the local governance of crime, disorder and security in contemporary UK*. *7*(4). https://doi.org/10.1177/1748895807082059

Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400/231

Labolo, M. (2016). *Pengantar Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24

Masrinanda, N. S. (2025). *Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*. 1–16. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22520

Meijer, A., & Thaens, M. (2018). *Quantified street: Smart governance of urban safety*. *23*(1). https://doi.org/10.3233/IP-170422

Muhammad Hasim, W. R. H. (2022). *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Satlinmas Gunsa Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Takalar*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9026

Sibarani, E. N. (2025). *Pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat*. 1–10. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22520

Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional Pemrograman Linear*.

Sumaili, A. H. (2025). *Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Balaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara*. 1–17. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/25050